

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar fundamental dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Di tengah dinamika global yang ditandai oleh perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, serta meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam, isu ketahanan pangan menjadi perhatian penting dalam perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun lokal. Pangan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan dasar manusia, tetapi juga sebagai faktor strategis yang menentukan stabilitas sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Oleh karena itu, upaya mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan memerlukan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemerintah, pelaku ekonomi, dan lembaga masyarakat di tingkat desa.

Pada tataran desa, ketahanan pangan memiliki makna yang lebih kompleks. Desa sebagai satuan sosial terkecil memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan pangan melalui aktivitas pertanian, peternakan, maupun pengelolaan sumber daya alam lainnya. Namun demikian, banyak desa di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan potensi sumber daya lokalnya. Permasalahan seperti keterbatasan modal, rendahnya inovasi teknologi, serta lemahnya kelembagaan ekonomi desa sering kali menjadi penghambat dalam mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan lembaga yang mampu mengorganisasi potensi ekonomi desa secara efektif, sekaligus menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Salah satu bentuk kelembagaan tersebut adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes merupakan instrumen penting dalam kebijakan pembangunan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaga

ini dibentuk sebagai wadah bagi masyarakat desa untuk mengelola potensi ekonomi lokal secara kolektif dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Fungsi utama BUMDes bukan semata-mata sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang berlandaskan pada nilai gotong royong dan kemandirian desa. Melalui kegiatan usaha yang berbasis potensi lokal, BUMDes diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat kapasitas desa dalam menghadapi tantangan pembangunan, termasuk dalam bidang ketahanan pangan.

Dalam konteks ketahanan pangan, BUMDes memiliki potensi besar untuk berperan sebagai fasilitator dan katalisator pembangunan pertanian desa. Melalui pengelolaan usaha yang terkait dengan sektor pertanian, peternakan, dan pengolahan hasil pangan, BUMDes dapat menjadi jembatan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan tujuan pembangunan berkelanjutan. BUMDes yang mampu mengelola sumber daya lokal secara produktif dapat memperkuat sistem pangan desa melalui peningkatan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan yang efisien serta berkeadilan. Selain itu, keberadaan BUMDes dapat membantu membangun kemandirian ekonomi desa dengan memperkuat rantai nilai pertanian lokal, dari hulu hingga hilir.

Berbagai penelitian terdahulu telah menegaskan pentingnya peran BUMDes dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian oleh (Adolph, 2016) dalam *Jurnal Pembangunan Pertanian Polbangtan Bogor* menemukan bahwa BUMDes di Kelurahan Karangrejek, Kabupaten Gunung Kidul, berperan secara tidak langsung dalam mendukung ketahanan pangan melalui pemberian pelatihan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengolahan hasil potensi lokal. Meskipun belum berperan langsung dalam produksi pangan, BUMDes di wilayah tersebut terbukti membantu memperkuat fondasi ekonomi masyarakat petani melalui pemberdayaan dan dukungan permodalan. Selanjutnya, penelitian (Edy & Suherman, 2021) di Desa Waondowolio, Kabupaten Buton, menunjukkan bahwa BUMDes memiliki peran

signifikan dalam pemberian modal usaha, penyediaan sarana produksi pertanian (saprodi), serta peningkatan kapasitas tenaga kerja petani cabai rawit. Hasil penelitian yang dimuat dalam *Jurnal Agribisnis Universitas Muhammadiyah Buton* ini menegaskan bahwa dukungan kelembagaan BUMDes mampu meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat desa dan memperkuat ketahanan pangan lokal.

Temuan serupa juga disampaikan oleh (Irmayani Irmayani *et al.*, 2023) melalui penelitian berjudul “*Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Upaya Meningkatkan Hasil Pertanian di Desa Pakeng*” yang dipublikasikan dalam *Prosiding Polbangtan Manokwari*. Penelitian tersebut menyoroti bagaimana BUMDes membantu meningkatkan hasil pertanian melalui kegiatan penyediaan pupuk organik, dukungan modal bagi petani, dan inovasi dalam praktik pertanian ramah lingkungan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa BUMDes tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan ketahanan pangan desa. Selain itu, (Harold *et al.*, 2025) dalam penelitian berjudul “*Peran BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan di Desa Molutabu, Kecamatan Kabila Bone*” yang diterbitkan dalam *Sosiohumaniora: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat FIS UNG* menegaskan bahwa kegiatan pembibitan, pelatihan, dan pendampingan yang dilakukan BUMDes berdampak langsung terhadap peningkatan hasil pertanian dan kesejahteraan petani. Program BUMDes di Desa Molutabu menjadi contoh nyata bahwa penguatan kelembagaan ekonomi desa dapat mendorong ketahanan pangan berbasis komunitas yang berkelanjutan.

Berangkat dari berbagai penelitian tersebut, tampak bahwa BUMDes memiliki potensi strategis sebagai aktor penting dalam pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di tingkat lokal. Namun, setiap daerah memiliki konteks sosial dan karakteristik yang berbeda, sehingga peran dan efektivitas BUMDes dalam mendukung ketahanan pangan pun bervariasi. Fenomena inilah yang juga tampak di BUMDes Berkah Manunggal, Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang menjadi fokus penelitian ini. BUMDes tersebut

berinovasi dalam bidang pertanian berkelanjutan melalui pengembangan usaha produksi pupuk organik padat (POP) dan pupuk organik cair (POC) berbasis potensi lokal, pengelolaan hasil panen melalui unit penggilingan padi, serta kerja sama pengembangan komoditas pertanian tertentu yang sejalan dengan program Desa Inovasi Pertanian Organik dari pemerintah daerah. Program ini tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekologi dan kemandirian pangan masyarakat.

Meskipun demikian, di balik keberhasilan program tersebut, masih terdapat fenomena menarik yang perlu dikaji lebih dalam. BUMDes Berkah Manunggal telah aktif mendukung kegiatan pertanian organik, tetapi belum ada kajian empiris yang menggambarkan secara komprehensif sejauh mana peran lembaga ini berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan pangan masyarakat Desa Bedingin. Selain itu, masih ditemukan berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya diversifikasi usaha, serta tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Di sisi lain, terdapat pula dukungan pemerintah desa dan potensi sumber daya lokal yang besar, yang menjadi modal sosial penting bagi keberlanjutan program. Kesenjangan antara potensi besar yang dimiliki BUMDes dan berbagai tantangan yang dihadapi inilah yang menjadi fenomena utama penelitian ini. Fenomena tersebut menggambarkan adanya ketidaksesuaian antara peran ideal BUMDes sebagai penggerak ekonomi dan realitas di lapangan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Meskipun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara normatif diposisikan sebagai instrumen strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan desa, implementasi peran tersebut di tingkat lokal tidak selalu berjalan secara optimal. Setiap desa memiliki karakteristik sosial, ekonomi, sumber daya, serta kapasitas kelembagaan yang berbeda, sehingga efektivitas BUMDes dalam mendukung ketahanan pangan sangat bergantung pada konteks dan dinamika lokal. Kondisi ini juga terlihat di Desa Bedingin, Kecamatan Sambit,

Kabupaten Ponorogo, yang telah mengembangkan program ketahanan pangan berbasis pertanian melalui BUMDes Berkah Manunggal.

Hasil pengamatan awal dan wawancara dengan pemerintah desa, pengurus BUMDes, serta masyarakat menunjukkan bahwa BUMDes Berkah Manunggal telah menjalankan berbagai program yang mendukung ketahanan pangan masyarakat, khususnya melalui pengembangan sektor pertanian. Program tersebut antara lain produksi pupuk organik padat (POP) dan pupuk organik cair (POC) berbasis potensi lokal, pengelolaan hasil panen melalui unit penggilingan padi, serta kerja sama pengembangan komoditas pertanian tertentu. Program ini dirancang untuk menekan biaya produksi petani, meningkatkan kualitas hasil pertanian, serta mendorong terwujudnya pangan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Namun demikian, pelaksanaan program ketahanan pangan melalui BUMDes di Desa Bedingin masih menghadapi berbagai keterbatasan dan tantangan. Tingkat adopsi pertanian organik oleh petani masih relatif rendah dan belum merata, sementara ketergantungan terhadap pupuk kimia konvensional masih cukup tinggi. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan BUMDes, belum terpenuhinya aspek legalitas usaha pupuk organik, serta perubahan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan dana ketahanan pangan desa turut memengaruhi optimalisasi peran BUMDes. Kondisi alam seperti fluktuasi cuaca dan musim tanam juga menjadi faktor eksternal yang memengaruhi stabilitas produksi pangan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dilihat adanya kesenjangan antara peran ideal BUMDes sebagai penggerak ketahanan pangan desa sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Di satu sisi, BUMDes Berkah Manunggal telah berperan aktif dalam mendukung ketersediaan, akses, dan kualitas pangan masyarakat desa, namun di sisi lain dampak yang dihasilkan masih bersifat bertahap dan belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memahami secara

empiris bagaimana peran BUMDes Berkah Manunggal dalam mendukung program ketahanan pangan masyarakat Desa Bedingin, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Untuk mengkaji lebih dalam dinamika peran BUMDes Berkah Manunggal dalam mendukung program ketahanan pangan masyarakat Desa Bedingin, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali secara mendalam pandangan, pengalaman, dan praktik para aktor yang terlibat, baik pengurus BUMDes, pemerintah desa, maupun masyarakat petani. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini dapat menangkap kompleksitas dinamika sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang berkembang di tingkat desa, sehingga fenomena peran BUMDes dalam mendukung ketahanan pangan dapat digambarkan secara kontekstual dan komprehensif.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam konteks integrasi kelembagaan ekonomi desa dengan kebijakan ketahanan pangan. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa, pengelola BUMDes, serta pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat strategi ketahanan pangan berbasis potensi lokal yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat desa melalui kelembagaan yang kuat dan mandiri. Melalui studi kasus BUMDes Berkah Manunggal di Desa Bedingin, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana lembaga ekonomi desa dapat berperan strategis dalam menjaga kedaulatan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai BUMDes umumnya menitikberatkan pada peran BUMDes dalam peningkatan ekonomi desa dan pengelolaan unit usaha, sementara pembahasan mengenai ketahanan pangan masih bersifat terbatas dan lebih fokus pada aspek produksi. Selain itu, peran BUMDes sering kali diposisikan sebatas pelaksana teknis program, belum dikaji secara komprehensif sebagai lembaga strategis yang mengintegrasikan kebijakan pemerintah desa, potensi lokal, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji peran BUMDes Berkah Manunggal dalam mendukung program ketahanan pangan masyarakat Desa Bedingin secara lebih menyeluruh, mencakup dimensi ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan, serta dikaitkan dengan kemandirian dan kedaulatan pangan desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana peran BUMDes Berkah Manunggal dalam mendukung program ketahanan pangan masyarakat Desa Bedingin?
2. Bagaimana bentuk kegiatan yang dilakukan BUMDes Berkah Manunggal dalam bidang pertanian untuk menunjang ketahanan pangan?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat BUMDes dalam menjalankan program ketahanan pangan di Desa Bedingin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis peran BUMDes Berkah Manunggal dalam mendukung program ketahanan pangan masyarakat Desa Bedingin.
2. Untuk menganalisis kegiatan BUMDes di bidang pertanian yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan.

3. Untuk menganalisis faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi BUMDes dalam pelaksanaan program ketahanan pangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan dan kajian pembangunan desa, khususnya dalam memahami peran kelembagaan ekonomi lokal seperti BUMDes dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat. Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya teori tentang pembangunan partisipatif dan penguatan kelembagaan desa dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dan pengelola BUMDes dalam meningkatkan efektivitas program ketahanan pangan. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan ekonomi desa yang berorientasi pada kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan mendorong kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penguatan ketahanan pangan berbasis potensi lokal.

E. Penegasan Istilah

1. BUMDes

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa, dengan pengelolaan dan kepemilikan modal dilakukan secara bersama antara pemerintah desa dan masyarakat. Namun demikian, penyertaan modal dalam BUMDes lebih diutamakan berasal dari pemerintah desa, yang bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan, baik sebagian maupun

seluruhnya, sebagai modal dasar untuk menjalankan kegiatan operasional BUMDes (Parjaman et al., 2021).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga dapat didefinisikan sebagai suatu entitas berbadan hukum yang dibentuk oleh pemerintah desa, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama antar desa, dengan tujuan untuk mengelola kegiatan usaha, mengoptimalkan pemanfaatan aset desa, mengembangkan investasi serta produktivitas ekonomi, menyediakan layanan publik, dan/atau mengembangkan bentuk usaha lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara maksimal (Kurniawan *et al.*, 2022).

Menurut (Firdaus, 2020) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga atau badan perekonomian desa yang dimiliki oleh pemerintah desa dan dikelola secara mandiri serta profesional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Modal BUMDes berasal sepenuhnya atau sebagian besar dari kekayaan desa yang dipisahkan dari kekayaan desa lainnya. Sebagai bentuk usaha yang dibentuk oleh desa, pengelolaan BUMDes dilaksanakan melalui kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat. Keberadaan BUMDes memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola perekonomian desa serta berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi desa berbadan hukum yang didirikan oleh pemerintah desa dengan tujuan utama untuk mengelola potensi dan kekayaan desa secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes dikelola secara profesional melalui kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat, dengan modal yang bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan. Keberadaan BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis desa, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi lokal yang mendorong kemandirian,

memperkuat tata kelola perekonomian desa, dan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

2. Ketahanan Pangan

Pengertian ketahanan pangan (*food security*), menurut United Nations' Committee on World Food Security (Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Keamanan Pangan Dunia), adalah semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap makanan yang cukup, aman, dan bergizi yang memenuhi preferensi makanan dan kebutuhan diet mereka untuk hidup aktif dan sehat (Wuli et al., 2023).

Menurut (Pangan & Kebijakan, 2009) ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga merupakan landasan bagi ketahanan pangan masyarakat, yang selanjutnya menjadi pilar bagi ketahanan pangan daerah dan nasional. Berdasarkan pemahaman tersebut maka salah satu prioritas utama pembangunan ketahanan pangan adalah memberdayakan masyarakat agar mereka mampu menanggulangi masalah pangannya secara mandiri serta mewujudkan ketahanan pangan rumahtangga-nya secara berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi negara hingga tingkat individu, yang tercermin dari ketersediaan pangan dalam jumlah dan mutu yang memadai, aman dikonsumsi, beragam, bergizi, merata, serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan pangan tersebut juga harus selaras dengan nilai agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, guna mendukung kehidupan yang sehat, aktif, produktif, dan berkelanjutan.

Secara konseptual, ketahanan pangan tidak hanya dipandang sebagai isu ekonomi, tetapi juga sebagai isu sosial, politik, dan lingkungan. (Arida et al., 2015) menyebutkan bahwa ketahanan pangan memiliki keterkaitan erat dengan hak asasi manusia, karena pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak dasar setiap individu. Oleh sebab itu, keberhasilan suatu

wilayah dalam mencapai ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh tingkat produksi pertanian, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menjamin akses dan distribusi pangan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat Kemensos RI (2023).

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang Undang Dasar 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas (Sihombing, 2023).

Dalam konteks pedesaan, ketahanan pangan dimaknai sebagai kemampuan masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri melalui pengelolaan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Kementerian Keuangan (2022) menjelaskan bahwa ketahanan pangan di tingkat desa mencakup tiga aspek penting, yaitu:

- 1) kemandirian produksi pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian
- 2) diversifikasi sumber pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada satu komoditas
- 3) stabilitas pasokan pangan melalui penguatan kelembagaan desa seperti kelompok tani dan BUMDes. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan ekonomi desa menjadi kunci strategis dalam memperkuat sistem pangan lokal yang tangguh terhadap krisis ekonomi maupun perubahan iklim.

Dalam penelitian ini, istilah ketahanan pangan masyarakat desa digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana masyarakat Desa Bedingin memiliki kemampuan untuk menjamin ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan melalui dukungan kelembagaan lokal, khususnya BUMDes Berkah Manunggal. BUMDes berperan dalam

memperkuat ketahanan pangan melalui kegiatan ekonomi produktif di sektor pertanian, seperti produksi pupuk organik padat (POP) dan pupuk organik cair (POC), serta pemberdayaan petani dalam praktik pertanian berkelanjutan. Dengan demikian, ketahanan pangan dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai hasil akhir berupa ketersediaan pangan, tetapi juga sebagai proses sosial dan ekonomi yang melibatkan partisipasi masyarakat dan tata kelola kelembagaan desa.

3. Masyarakat Desa

Masyarakat desa merupakan subjek utama dalam pembangunan yang memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan program pemerintah, termasuk dalam bidang ketahanan pangan dan pengelolaan ekonomi lokal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (5), masyarakat desa adalah “sekumpulan orang yang tinggal di wilayah desa dan terikat karena adanya ikatan asal usul, adat istiadat, serta kesatuan sosial budaya.” Definisi ini menegaskan bahwa masyarakat desa bukan hanya sekumpulan individu yang tinggal di suatu wilayah, tetapi juga komunitas yang memiliki nilai-nilai sosial, budaya, dan solidaritas yang kuat. Oleh sebab itu, masyarakat desa menjadi bagian integral dari sistem sosial yang menopang kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di tingkat local (Desa & Margayaningsih, n.d.).

Dalam konteks pemerintahan dan pembangunan lokal, masyarakat desa memiliki peran ganda, yaitu sebagai objek sekaligus subjek pembangunan. Sebagai objek, masyarakat menjadi penerima manfaat dari berbagai program pembangunan; namun sebagai subjek, masyarakat desa juga berperan aktif dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan yang dilakukan di wilayahnya (Chambers, 1983). Melalui mekanisme partisipatif ini, masyarakat desa didorong untuk berdaya, mandiri, dan mampu mengelola potensi lokal secara berkelanjutan. Dengan

demikian, pembangunan desa tidak lagi bersifat *top-down*, melainkan berbasis pada kebutuhan dan inisiatif masyarakat itu sendiri.

Dalam penelitian ini, istilah masyarakat desa mengacu pada penduduk Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, yang berperan aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial melalui keterlibatan dalam program-program BUMDes Berkah Manunggal. Masyarakat Desa Bedingin memiliki karakteristik sosial agraris, dengan sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan pelaku usaha kecil di sektor pertanian organik. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan BUMDes menjadi cerminan dari partisipasi lokal yang berdaya guna, di mana nilai gotong royong, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif menjadi dasar dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan bersama di tingkat desa.

F. Landasan Teori

1. Teori Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu teori penting dalam kajian pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Food and Agriculture Organization (FAO, 1996), ketahanan pangan (*food security*) adalah kondisi ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan sesuai untuk kebutuhan hidup aktif dan sehat. Definisi ini menekankan bahwa ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan pangan, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan pangan secara berkelanjutan.

FAO (1996) menjelaskan empat pilar utama ketahanan pangan, yaitu:

- 1) Ketersediaan pangan (*food availability*), yaitu adanya ketersediaan pangan yang cukup dari hasil produksi domestik, cadangan pangan, atau impor.

- 2) Akses terhadap pangan (*food access*), yakni kemampuan individu dan rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup baik melalui produksi sendiri, pembelian, maupun bantuan.
- 3) Pemanfaatan pangan (*food utilization*), berkaitan dengan cara masyarakat mengolah dan mengonsumsi pangan agar tercapai gizi seimbang dan kesehatan optimal.
- 4) Stabilitas pangan (*food stability*), yaitu keberlanjutan dari ketiga aspek sebelumnya dalam jangka panjang agar masyarakat tidak rentan terhadap fluktuasi pasokan atau harga pangan.

Menurut (Pasaribu, 1996) dalam konteks Indonesia, teori ketahanan pangan diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 pasal 1 ayat 17 tentang Pangan, yang mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga perseorangan, tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan keyakinan dan budaya masyarakat untuk hidup sehat dan produktif secara berkelanjutan. Undang-undang ini menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan bagian dari hak dasar warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara melalui sistem pangan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Menurut Hermanto (2015) dalam *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, ketahanan pangan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pembangunan sektor pertanian, peran kelembagaan masyarakat, serta keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap petani dan produksi pangan lokal. Hermanto menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional berawal dari ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan desa, di mana desa merupakan basis utama produksi pangan dan pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, memperkuat ketahanan pangan di desa berarti memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional.

Teori ketahanan pangan juga menekankan pentingnya kemandirian pangan (*food self-reliance*) dan kedaulatan pangan (*food sovereignty*) sebagai bagian dari upaya mencapai keberlanjutan. (Darojat et al., 2025) dalam *Jurnal Agribisnis* menyatakan bahwa ketahanan pangan yang berkelanjutan harus mencakup tiga dimensi: keberlanjutan produksi, keadilan distribusi, dan partisipasi masyarakat dalam sistem pangan lokal. Dengan demikian, penguatan ketahanan pangan tidak hanya dilakukan melalui peningkatan produksi, tetapi juga melalui pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa yang berperan langsung dalam sistem pangan.

Dalam penelitian ini, teori ketahanan pangan digunakan untuk memahami sejauh mana BUMDes Berkah Manunggal berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat Desa Bedingin melalui kegiatan pertanian organik dan pengelolaan sumber daya lokal. BUMDes dipandang sebagai aktor kelembagaan yang dapat memperkuat dimensi ketersediaan dan akses pangan melalui produksi pupuk organik serta dukungan terhadap produktivitas pertanian. Dengan demikian, teori ketahanan pangan menjadi landasan analitis utama untuk menilai hubungan antara peran BUMDes dan peningkatan kemandirian pangan masyarakat desa.

2. Teori Manajemen Publik

Menurut Nor Ghofur (2014) Mengartikan bahwa manajemen publik adalah manajemen pemerintah, yang artinya manajemen publik juga bermaksud untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan kepada masyarakat (Lubis & Ginting, n.d.).

Manajemen publik merupakan cara mengelola organisasi sektor publik agar tujuan pemerintahan dapat tercapai secara efektif dan bertanggung jawab. *George R. Terry* menjelaskan bahwa manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam sektor publik manajemen tidak hanya berfokus pada urusan

administrasi tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat sebagai penerima layanan.

Dalam teori manajemen publik organisasi seperti pemerintah desa dan BUMDes dituntut dikelola secara profesional. Prinsip akuntabilitas transparansi dan keterlibatan masyarakat menjadi dasar penting dalam pengelolaan tersebut. Manajemen publik modern harus bergerak dari pola birokrasi yang kaku menuju pengelolaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu organisasi publik berperan sebagai pengelola sumber daya yang mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Manajemen publik juga berkaitan erat dengan konsep *good governance* yang menekankan kerja sama antara pemerintah sektor swasta dan masyarakat. Prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan keadilan menjadi landasan dalam pelaksanaan program publik. Di tingkat desa BUMDes berfungsi sebagai sarana untuk menghubungkan kebijakan pemerintah desa dengan kebutuhan riil masyarakat melalui pengelolaan usaha ekonomi desa.

Selain itu manajemen publik menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Keterlibatan masyarakat membuat program publik lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi lokal. Dalam konteks ini BUMDes dapat dipahami sebagai wujud penerapan manajemen publik partisipatif di tingkat desa.

Dengan demikian teori manajemen publik memberikan dasar dalam memahami peran BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga menjalankan fungsi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Penerapan prinsip manajemen publik dalam pengelolaan BUMDes diharapkan mampu memperkuat kinerja kelembagaan serta mendukung keberlanjutan program ketahanan pangan.

Teori manajemen publik digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana BUMDes Berkah Manunggal dikelola sebagai organisasi sektor publik dalam mendukung program ketahanan pangan desa.

Dalam perspektif manajemen publik, BUMDes dipandang bukan sekadar unit usaha yang berorientasi pada keuntungan, melainkan sebagai instrumen kebijakan publik di tingkat desa yang berfungsi mengelola sumber daya desa secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, variabel peran BUMDes dalam penelitian ini dianalisis melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen publik, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam program ketahanan pangan.

G. Definisi Operasional

Tabel 1. 1 Definisi Operasional

Komponen Teori Ketahanan Pangan	Definisi Operasional dalam Penelitian Ini	Indikator (Dimensi Pengamatan)
1. Ketersediaan Pangan (Availability)	Tingkat kecukupan pangan yang diperoleh melalui hasil pertanian masyarakat desa dengan dukungan kegiatan BUMDes.	- Ketersediaan pupuk organik PADAT (POP) dan CAIR (POC) - Peningkatan produktivitas pertanian - Ketersediaan komoditas pangan lokal
2. Akses Pangan (Access)	Kemampuan masyarakat untuk memperoleh pangan melalui produksi sendiri atau daya beli dari hasil ekonomi desa.	- Kemudahan memperoleh sarana pertanian dari BUMDes - Dukungan ekonomi BUMDes terhadap petani - Harga pangan yang terjangkau
3. Pemanfaatan Pangan (Utilization)	Cara masyarakat mengolah dan mengonsumsi pangan secara sehat dan bergizi berdasarkan hasil produksi lokal.	- Pemanfaatan hasil pertanian organik untuk konsumsi - Pengetahuan gizi dan pola konsumsi pangan sehat - Penggunaan pupuk organik oleh petani

Komponen Teori Ketahanan Pangan	Definisi Operasional dalam Penelitian Ini	Indikator (Dimensi Pengamatan)
4. Stabilitas Pangan (Stability)	Keberlanjutan ketersediaan dan akses pangan dalam jangka panjang meskipun terdapat hambatan iklim atau ekonomi.	- Konsistensi produksi pupuk dan pertanian organik - Ketahanan terhadap perubahan musim/cuaca - Keberlanjutan program Desa Inovasi Pertanian Organik
5. Kemandirian & Kedaulatan Pangan	Kemampuan masyarakat desa memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri berbasis sumber daya lokal tanpa bergantung pada luar desa.	- Pemanfaatan potensi lokal dalam pertanian - Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes - Diversifikasi tanaman pangan lokal

Sumber : FAO, 1996; UU No.18/2012

Tabel 1. 2 Definisi Operasional Manajemen Publik

Komponen Teori Publik Manajemen	Definisi Operasional dalam penelitian ini	Indikator (Dimensi Pengamatan)
Perencanaan	Proses penyusunan program dan unit usaha BUMDes dalam mendukung ketahanan pangan yang dilakukan secara bertahap dan melalui musyawarah desa serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kapasitas desa	1) Keterlibatan BUMDes dalam musyawarah desa 2) Penetapan unit usaha ketahanan pangan 3) Kesesuaian program dengan kebutuhan petani
Pengorganisasian	Proses pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengurus BUMDes dalam mengelola unit usaha ketahanan pangan dan administrasi kelembagaan	1) Struktur organisasi BUMDes 2) Pembagian tugas pengurus 3) Peran sekretaris dalam administrasi dan pelaporan

Komponen Teori Publik Manajemen	Definisi Operasional dalam penelitian ini	Indikator (Dimensi Pengamatan)
Pelaksanaan	Pelaksanaan nyata program dan unit usaha ketahanan pangan yang dikelola BUMDes dan melibatkan masyarakat serta kelompok tani sebagai pelaku utama	1) Pelaksanaan unit usaha pertanian 2) Pengelolaan pupuk organik 3) Pengelolaan pengairan dan hasil panen
Pengawasan	Mekanisme pemantauan dan evaluasi kegiatan serta keuangan BUMDes yang dilakukan secara rutin dan dilaporkan kepada pemerintah desa	1) Pencatatan pemasukan dan pengeluaran 2) Pelaporan rutin kepada pemerintah desa 3) Evaluasi dalam forum musyawarah desa

Sumber: Terry, G. R. (2010). *Principles of Management*. Homewood: Richard D. Irwin.

H. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang peran BUMDes dalam mendukung program ketahanan pangan masyarakat desa. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan secara utuh bagaimana BUMDes Berkah Manunggal melaksanakan kegiatan pertanian organik, berinteraksi dengan masyarakat, serta menghadapi faktor pendukung dan penghambat dalam mendukung ketahanan pangan.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta, peristiwa, dan aktivitas sosial secara sistematis sesuai dengan konteks lapangan. Hasil penelitian tidak diarahkan pada pengujian hipotesis, tetapi pada pemaknaan dan pemahaman fenomena yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada deskripsi mendalam terhadap peran dan kontribusi BUMDes dalam sistem ketahanan pangan masyarakat Desa Bedingin.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini dipilih secara *purposive* (sengaja) karena memiliki BUMDes aktif, yaitu BUMDes Berkah Manunggal, yang berinovasi dalam bidang pertanian organik dan menjadi bagian dari program Desa Inovasi Pertanian Organik. Desa Bedingin memiliki karakteristik sosial ekonomi yang didominasi oleh masyarakat petani, sehingga kegiatan BUMDes di bidang pertanian berpengaruh langsung terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Subjek/Informan Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam kegiatan BUMDes Berkah Manunggal serta program ketahanan pangan di Desa Bedingin. Informan ditentukan menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu penentuan informan berdasarkan rekomendasi dari informan awal yang dianggap mengetahui fenomena penelitian secara mendalam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan instrumen penting yang dapat memengaruhi kualitas data hasil penelitian. Pengumpulan data dilakukan dari berbagai sumber, setting, dan cara agar informasi yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan analisis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu bentuk interaksi dan proses dialog antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap informan yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengelolaan BUMDes Berkah Manunggal serta program ketahanan pangan di Desa Bedingin.

Informan terdiri atas pemerintah desa, pengurus BUMDes, petani anggota atau mitra BUMDes, serta masyarakat setempat yang mengetahui aktivitas dan dampak BUMDes terhadap ketahanan pangan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan pokok yang telah disiapkan sebelumnya, namun tetap memberikan ruang bagi peneliti untuk mengembangkan pertanyaan berdasarkan respons dan informasi yang muncul dari narasumber.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali data secara mendalam mengenai bentuk peran BUMDes, strategi pemberdayaan masyarakat, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat upaya penguatan ketahanan pangan di tingkat desa.

b. Observasi (*Observation*)

Observasi adalah proses pengumpulan data dengan mengamati langsung lokasi penelitian. Menurut Zainal Arifin dalam buku (Kristanto, 2018), observasi merupakan proses pencatatan secara terarah, masuk akal, dan logis terhadap berbagai fenomena atau situasi yang terjadi.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung terhadap aktivitas BUMDes Berkah Manunggal di Desa Bedingin, yang meliputi proses produksi pupuk organik padat (POP) dan pupuk organik cair (POC), kegiatan pertanian organik masyarakat, serta interaksi antara pengurus BUMDes, petani, dan pemerintah desa. Observasi juga dilakukan terhadap kondisi lingkungan pertanian, sarana dan prasarana yang digunakan, serta pola partisipasi masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan.

Melalui teknik observasi ini, peneliti berupaya memperoleh gambaran nyata dan mendalam mengenai bentuk peran BUMDes dalam

mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis pertanian serta dampaknya terhadap peningkatan ketahanan pangan masyarakat desa.

c. Dokumentasi (*Documentation*)

Studi dokumentasi dilakukan sebagai pelengkap metode wawancara dan observasi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari dokumen, arsip, maupun catatan tertulis yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi ini merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi data penelitian baik berupa sumber tertulis, dokumen, dan gambar (foto).

6. Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2022) teknik analisis data merupakan proses meneliti dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara dan catatan lapangan. Dalam melakukan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif atau lebih spesifik menggunakan metode interaktif. Penulis menerangkan prosedur dalam menganalisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan peringkasan data yang diperoleh, memilih bagian yang penting saja, menghilangkan bagian yang tidak diperlukan dan diatur sedemikian rupa untuk fokus pada unsur-unsur yang penting.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses mengorganisir dan menampilkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dalam bentuk yang sudah terperinci. Dengan begitu data dapat disajikan dengan struktur untuk mempermudah analisis dan pemahaman informasi yang terkandung dalam data tersebut.

c. Kesimpulan

Tujuan dari langkah akhir dalam proses penelitian atau analisis data yaitu menarik kesimpulan atau verifikasi yang merupakan bagian terpenting dari sebuah penelitian. Kesimpulan ialah menemukan

manfaat dan kebenaran data yang diperoleh dari proses analisis data, wawancara, observasi dan dokumentasi.

7. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data adalah elemen krusial dalam penelitian karena data tersebut akan menjadi landasan untuk analisis serta menjadi pondasi untuk menghasilkan kesimpulan penelitian. Oleh karena itu, data yang diperoleh harus memenuhi kriteria keabsahan yang telah ditetapkan (Saadah *et al.*, 2022). Dalam konteks penelitian kualitatif, keabsahan data mencerminkan standar kebenaran terhadap hasil temuan atau data yang diperoleh. Sebuah data dianggap valid jika tidak terdapat perbedaan antara apa yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Dengan kata lain, keabsahan data menegaskan akurasi dan konsistensi antara informasi yang disajikan dengan realitas yang diamati dalam penelitian (Elma Sutriani, 2024).

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi sesuai metodologi triangulasi yang diajukan oleh Norman K. Denzin, yang pada dasarnya adalah pendekatan multimetode yang digunakan oleh peneliti saat mengumpulkan dan menganalisis data. Menurut Denzin (1978) dalam (Saadah *et al.*, 2022), metodologi triangulasi adalah teknik yang menggunakan berbagai sumber data dan metode pengumpulan data untuk menguji keabsahan data. Triangulasi merujuk pada penggabungan atau kombinasi berbagai metode yang digunakan untuk menginvestigasi fenomena dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda.

Metodologi triangulasi merupakan pendekatan di mana peneliti memanfaatkan berbagai teknik seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk meningkatkan validitas temuan penelitian, serta untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan memastikan keabsahan hasil

penelitian terhadap fenomena yang sedang di teliti (Wardatun & Khadavi, 2025).

